ABSTRAKSI

Pada era reformasi kebebasan pers tidak lagi dihalangi-halangi, yang ditandai oleh banyaknya pers baru terbit, baik berbentuk surat kabar maupun tabloid. Tidak mengherankan bila pada periode awal reformasi terdapat 582 surat izin baru terbit. Kebebasan pers seakan telah memperoleh kemenangannya setelah mengalami perjuangan panjang yang amat melelahkan dan menyakitkan. Pembungkaman kebebasan pers atas nama sopan santun dan eufemisme dengan seketat mungkin menjalankan jurnalisme rekaman tak lagi dialami pers Indonesia. Tidak hanya sebatas itu, kebebasan berpendapat pun seolah telah menemukan masanya, sehingga tidak mengherankan bila pers pada masa itu bebas memberitakan apa saja termasuk kekuasaan yang selama ini dianggap sakral. Hal itu bisa dijumpai dalam pemberitaan, opini, dan tajuk surat kabar-surat kabar pada masa itu yang mengangkat tema-tema demokrasi aktual. Tema-tema seperti penegakan hukum, pemberantasan KKN, pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, penghapusan dwifungsi TNI, dan lain-lain cukup akrab di kalangan masyarakat pembaca.

Namun bila diamati lebih jauh, perjalanan kebebasan pers yang lahir pasca reformasi tampaknya tidak serta-merta memiliki korelasi positif dengan proses demokratisasi. Pers pada era tersebut lebih cenderung berperan sebagai institusi ekonomi yang didominasi oleh logika sirkuit kepentingan akumulasi modal, setelah mengendornya regulasi negara dan digantikan oleh mekanisme pasar. Dominasi logika modal itulah yang menciptakan tatanan persaingan pasar (*market structure*), di mana institusi pers menerapkan segala strategi pasar (*market conducts*) untuk menjadikan hampir semua isu atau peristiwa sebagai komoditas informasi dan hiburan. Semuanya dikemas begitu rupa hingga punya daya tarik demikian dahsyat demi maksimalisasi *rating* dan pemasukan iklan. Pada gilirannya, terjadinya pemusatan kepemilikan perusahaan media menuju kerajaan pers dengan *aggressive marketing*-nya seperti sekarang ini bisa dijelaskan dalam konteks itu, meskipun embrionya telah ada sejak era 1980-an. Umumnya, kerajaan pers tersebut didukung oleh unit-unit bisnis baik media maupun non-media. *Jawa Pos*, misalnya, yang membawa bendera *Jawa Pos Group* (JPG) telah mengembangkan jaringan berita terluas dengan lebih dari 40 jaringan percetakan di seluruh Indonesia. Selain itu, JPG juga didukung oleh unit-unit bisnis di luar media mulai dari perbankan, perhotelan, internet sevice, hingga real estate. Hal yang sama juga dilakukan oleh *Kompas* di bawah bendera *Kelompok Kompas-Gramedia* (KKG) dan *Media Indonesia* di bawah bendera Surya Presindo, tentunya dengan *aggressive marketing* yang berbeda-beda.

Padahal dalam negara demokratis, pers selalu diteorisasikan sebagai pilar keempat demokrasi dengan prasyarat adanya kebebasan pers untuk melahirkan pers yang bebas. Pers yang bebas berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelewengan penyelenggaraan negara. Lazimnya, di negara demokratis di mana telah terbentuk *civil society* yang kuat sebagai kekuatan pengimbang negara maka persnya relatif bebas, karena kebebasan persnya terjamin. *Civil society* sebagai kekuatan pengimbang negara dan sekaligus kekuatan kritis-reflektif dalam masyarakat, dengan demikian, mengisyaratkan pentingnya wacana publik sekaligus keberadaan dunia publik yang relatif bebas dari intervensi negara dan modal. Konsep *public sphere*

merupakan suatu konnsepsi ideal atau penggambaran suatu *ideal communication situation* yang oleh banyak pihak sering dipertanyakan validitas historisnya. Namun, setidaknya konsepsi *public sphere* bisa dijadikan acuan normatif untuk mengukur sejauhmana proses demokratisasi telah berhasil terselenggara dalam masyarakat. Sebab, dalam *public sphere* lah masyarakat dalam posisinya yang setara dapat melakukan diskursus rasional mengenai masalah-masalah menyangkut kepentingan bersama tanpa terdistorsi oleh intervensi kepentingan negara ataupun modal.

Media massa, khususnya pers sebagai bagian dari dunia publik, pada gilirannya memainkan peranan untuk menyediakan forum publik bagi berlangsungnya komunikasi dan debat rasional menuju komunikasi ideal tanpa distorsi. Namun, tidaklah demikian kenyataannya bila melihat perkembangan pers Indonesia pasca Orde Baru. Seiring mengendornya regulasi negara dengan logika represifnya melalui *ideoligical state apparatus* dan *repressive state apparatus*-nya, maka pers memang relatif bebas dari intervensi negara. Tetapi hilangnya regulasi negara kemudian digantikan oleh mekanisme pasar dengan logika modalnya, maka tampaknya pers memang belum terbebas dari kepentingan modal. Boleh jadi, karena dalam proses pergulatan panjang dengan kepentingan modal itulah, pers Indonesia pasca Orde Baru tidak cukup lugas, kritis, serta tegas sikap, posisi, dan keberpihakannya.

Mengamati tajuk-tajuk *Jawa Pos* (barangkali juga pers-pers Indonesia lainnya), yang seharusnya menarik dan penuh *greget* karena mengangkat tema-tema demokrasi semacam penegakan hukum, pemberantasan KKN, pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, dan penghapusan dwifungsi TNI. Tetapi yang terjadi kemudian adalah tajuk-tajuk tersebut seolah menjadi kehilangan *aura* dan *greget* dalam proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi, karena kebanyakan ditulis dalam model angin surga dan model jalan tengah. Model pertama biasanya hanya berisi harapan-harapan yang memabukkan dan imbauan-imbauan kosong. Secara keseluruhan model ini tidak mencerdaskan bahkan membodohi masyarakat, karena sifatnya yang tidak menjelaskan dan memahamkan masyarakat malah menimbulkan kebingungan masyarakat. Model kedua biasanya dalam menyikapi suatu persoalan yang diangkat tajuk tersebut tidak memiliki kejelasan dan ketegasan sikap, posisi, dan keberpihakan. Sesungguhnya model-model tajuk seperti inilah yang dianggap tidak cukup rasional, bahkan tidak cukup punya signifikasi dalam proses pembentukan wacana rasional dalam masyarakat. Sebab tidak cukup mampu membuat publik tergerak untuk berpikir dan merumuskan sendiri opininya lewat debat rasional mengenai suatu persoalan.

Masa transisi demokrasi seperti yang kini terjadi di Indonesia boleh jadi masih sangat panjang dan melelahkan. Oleh karenanya, publik membutuhkan pers, khususnya tajuk yang bersifat lugas, kritis, tegas serta berfungsi sebagai anjing penjaga yang begitu menyalak ketika melihat penyelewengan dalam penyelenggaraan negara. Meski demikian, pers seharusnya tidak hanya sebatas menyalak seperti anjing penjaga, tetapi juga harus mampu menyentuh emosi rakyat, memikirkan apa yang memang dipikirkan rakyat, memperhatikan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain, berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Barangkali mengharapkan lahirnya pers, khususnya tajuk dengan model seperti itu tampaknya masih jauh panggang dari api. Entah seberapa lama lagi publik harus menelan kekecewaan.